

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Administrasi perkantoran memegang peran vital dalam mendukung kinerja suatu organisasi, terutama di lembaga pemerintahan seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Administrasi yang efektif dan efisien memastikan seluruh proses kerja berjalan lancar, akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan. Namun, pada kenyataannya masih banyak instansi pemerintahan yang menggunakan sistem administrasi manual dalam pengelolaan data, dokumen, dan komunikasi internal. Sistem manual tersebut dinilai kurang relevan dengan tuntutan era digital yang menuntut kecepatan, transparansi, dan efisiensi dalam pengelolaan administrasi.

Di Kantor DPRD Provinsi Sumatera Barat, berbagai aktivitas administrasi seperti pengarsipan dokumen, pengelolaan surat-menyurat, serta komunikasi internal masih banyak dilakukan secara konvensional. Kondisi ini menimbulkan sejumlah permasalahan, di antaranya proses pencarian dokumen yang membutuhkan waktu lama karena masih menggunakan metode penyimpanan fisik, risiko kerusakan atau kehilangan arsip yang cukup tinggi, serta penggunaan kertas dan ruang penyimpanan yang besar sehingga meningkatkan biaya operasional. Selain itu, sistem manual juga menyulitkan pegawai dalam memperoleh data secara cepat dan akurat, yang pada akhirnya dapat menghambat efektivitas kerja.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dalam beberapa tahun terakhir, digitalisasi administrasi perkantoran hadir sebagai solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut. Digitalisasi mengacu pada pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan dokumen secara elektronik sehingga lebih efisien dan terintegrasi. Menurut Laudon dan Laudon (2020), digitalisasi mampu meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat proses pengambilan keputusan, serta meningkatkan keamanan data. Selain itu, penerapan sistem digital juga mendukung transparansi dalam pengelolaan administrasi, yang merupakan aspek penting dalam lembaga publik seperti DPRD.

Pemerintah Indonesia sendiri telah mendorong transformasi digital dalam birokrasi melalui kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Kebijakan ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Meskipun demikian, implementasi SPBE di berbagai instansi masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, rendahnya kesiapan serta kompetensi sumber daya manusia, dan adanya resistensi terhadap perubahan budaya kerja dari sistem konvensional ke sistem digital. Tantangan ini menjadi semakin kompleks terutama di daerah yang belum memiliki dukungan infrastruktur digital yang memadai.

Sebagai lembaga yang memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, Kantor DPRD Provinsi Sumatera Barat membutuhkan sistem administrasi yang modern dan efektif guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugasnya. Digitalisasi administrasi diharapkan mampu mempercepat pengelolaan dokumen dan arsip, meningkatkan akurasi serta keamanan data, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat melalui data yang terintegrasi. Selain itu, digitalisasi juga berpotensi meningkatkan efisiensi operasional serta menekan biaya penggunaan kertas dan penyimpanan fisik.

Sebelum penerapan digitalisasi, proses administrasi di Kantor DPRD Provinsi Sumatera Barat masih didominasi oleh sistem manual, khususnya dalam pengelolaan surat-menyurat yang berbasis dokumen cetak. Kondisi tersebut seringkali menghambat efisiensi kerja karena memerlukan waktu yang cukup lama dalam pencarian dan pengelolaan data. Namun, dengan adanya digitalisasi administrasi, berbagai sistem berbasis website mulai diterapkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja. Sistem tersebut meliputi pencatatan daftar Surat Perintah Tugas (SPT), agenda kegiatan kesekretariatan, repository produk hukum DPRD Sumatera Barat, serta sistem surat-menyurat elektronik SRIKANDI. Penerapan sistem ini memungkinkan pegawai untuk mengakses data secara real-time, sehingga proses kerja menjadi lebih cepat, akurat, dan terintegrasi.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan digitalisasi dalam administrasi perkantoran pada Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat?
2. Bagaimana pengaruh digitalisasi terhadap efektivitas kinerja pegawai di lingkungan DPRD Provinsi Sumatera Barat?
3. Apa kendala yang dihadapi dalam penerapan digitalisasi administrasi perkantoran?
4. Bagaimana solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi kendala dalam penerapan digitalisasi tersebut?

1.3 Tujuan dan Manfaat

Tujuan:

1. Untuk melihat bagaimana penerapan digitalisasi dalam administrasi perkantoran pada Kantor DPRD Provinsi Sumatera Barat.
2. Untuk melihat bagaimana pengaruh digitalisasi terhadap efektivitas kinerja pegawai di lingkungan DPRD Provinsi Sumatera Barat.
3. Untuk mengidentifikasi kendala dalam penerapan digitalisasi administrasi perkantoran.
4. Untuk merumuskan solusi untuk mengatasi kendala dalam penerapan digitalisasi administrasi perkantoran.

Manfaat Pembahasan:

1. Manfaat Teoritis

Menambah wawasan akademik mengenai implementasi digitalisasi dalam administrasi perkantoran pemerintahan.

2. Manfaat Praktis

Memberikan rekomendasi yang dapat diterapkan oleh DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi perkantoran.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tugas akhir (TA) ini disusun untuk memberikan gambaran yang jelas dan sistematis mengenai isi dari keseluruhan pembahasan. Penulisan ini terdiri dari lima bab utama, dengan penjelasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat dari penyusunan tugas akhir. Penjelasan dalam bab ini bertujuan untuk menguraikan dasar pemikiran serta urgensi pembahasan yang dilakukan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat kajian teoritis yang mendasari topik tugas akhir, termasuk teori-teori terkait administrasi perkantoran, digitalisasi, efektivitas kinerja, serta Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Selain itu, bab ini juga menjelaskan kerangka pemikiran dan landasan konseptual yang digunakan.

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini menjelaskan profil Kantor DPRD Provinsi Sumatera Barat sebagai objek pembahasan. Uraian meliputi sejarah singkat, visi dan misi, struktur organisasi, nilai-nilai inti, serta peran dan fungsi Sekretariat DPRD sebagai pelaksana administrasi kelembagaan.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini berisi pemaparan dan analisis mengenai penerapan digitalisasi dalam administrasi perkantoran di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat. Pembahasan mencakup efektivitas yang dicapai, kendala yang dihadapi, serta solusi yang diupayakan dalam proses digitalisasi.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dari keseluruhan isi tugas akhir serta saran-saran yang diajukan penulis untuk meningkatkan keberhasilan penerapan digitalisasi administrasi di masa yang akan datang.

